



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkenannya Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Gedangan 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**., maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Gedangan periode 2021-2026.



Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sidoarjo, Agustus 2021

CAMAT GEDANGAN

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

PEMBINA

NIP. 19770924 199701 2001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR BAGAN	7
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan	12
1.3 Landasan Hukum	13
1.4 Hubungan Antar Dokumen	16
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi	19
2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedangan	27
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN	
3.1 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas & Fungsi OPD	40
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaah Renstra Kabupaten Sidoarjo	44
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	47
3.5 Penentuan Isu – Isu Srategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah	52
4.2 Tujuan dan Sasaran	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan	55



5.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan	57
BAB VI RENCANA DAN PROGRAM SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	61

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
2. Cascading Kinerja Kecamatan Gedangan
3. Berita Acara Penyusunan Renstra
4. Surat Keputusan Camat Gedangan



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Tabel 2.2.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	28
Tabel 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	28
Tabel 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 2.5.	Matrik Pencapaian Kinerja Pelayanan	31
Tabel 2.6.	Matrik Tantangan dan Peluang	38
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan	41
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	43
Tabel 3.3.	Kriteria Pembobotan	59
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedangan	63
Tabel 5.1.	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan	56
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan 26



IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu pendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Renstra adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Renstra memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra pada dasarnya merupakan penjabaran dari RJPMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis. Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Renja). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk



mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Periode Tahun 2021–2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi Renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Melalui penyusunan Renstra ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Gedangan. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kecamatan Gedangan dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "**Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan**", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target Renstra tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sidoarjo di tahun berkenaan serta merupakan sasaran akhir (*the ultimate goals*) pada Renstra. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 memiliki tantangan pembangunan yang cukup berat akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa memiliki dampak yang lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain yang struktur ekonominya



bertumpu pada sektor primer seperti pertanian. Dengan demikian, selaras dengan prioritas nasional maka arah kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan sosial.

RPJMD memiliki keterkaitan sistemik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program strategis dimanifestasikan ke dalam dokumen RPJMD, maka rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta kebutuhannya. Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD diturunkan menjadi target dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gedangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gedangan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan adalah untuk :

1. Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
2. Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2026, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Gedangan setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vii/Mpr/2001 Tentang Visi Dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari



- Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286).
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Telah Diubah Lagi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ”
 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
 19. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025.



21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021.
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Rencana Strategis harus diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo, RPJMN, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RTRW Provinsi Jawa Timur, RTRW Daerah lain yang berbatasan, dan RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan lampiran yang



memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan Kecamatan Gedangan masa kini, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategi yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Kecamatan Gedangan serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

Menguraikan analisis lingkungan internal dan eksternal serta isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu (5) tahun mendatang sampai dengan Tahun 2021.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan Gedangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.



BAB VIII PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

LAMPIRAN

Kecamatan Gedangan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo berbunyi sebagai berikut:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai masing-masing unsur di dalam struktur organisasi Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya. Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani:

- a. IMB sesuai kewenangan;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara;



- c. Legalitas salinan dokumen kependudukan
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV dan AKV);
- e. Rekomendasi izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/desa.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan kegiatan kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumahtangga perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dibagi menjadi beberapa sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam menerjemahkan rincian-rincian tugas kesekretariatan. Sub Bagian tersebut antara lain:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.



Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- 3) Menerima Permohonan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
- 4) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Teknis Kegiatan dibidang Pemerintahan;
 1. Pengesahan Pengantian antar waktu dan Pemberhentian karena
 2. Pengantian antar waktu anggota Badan Permusyawarah Desa
 3. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa



4. Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawarah desa
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas bidang pemerintahan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugasnya

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum antara lain ;
 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 3. Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan /reklame liar)
 4. Penanganan Konflik sosial
- c. Memproses Permohonan Izin Gangguan usaha mikro
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan Tugas bidang lain yang diberikan oleh Camat sesuai



dengan tugasnya

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang perekonomian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang perekonomian;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;
- e. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan;
- f. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Pelaksanaan pengelolaan data profil desa dan kelurahan
- i. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wira usaha baru;
- j. Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besardengan lembaga ekonomi pedesaan;
- k. Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL);
- l. Promosi produk industri dan dagang kecil dan mikro;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di



bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik;
- f. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dalamPeningkatan Ekonomi Lokal(P3EL);
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan
- i. ProgramKecamatanRamah Anak (CaRa);
- j. Pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria;
- k. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS;
- m. Pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangtugasnya.

7. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan fisik. Seksi Pembangunan Fisik dipimpin



oleh Kepala Seksi Pembangunan Fisik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan fisik;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan fisik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pembangunan fisik;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan fisik;
- e. Pemeliharaan rutin jalan lokal desa;
- f. Pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro diwilayah pennukiman;
- g. Melaksanakan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalandesa;
- h. Pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke transfer depo (TPS);
- i. Inventarisasi data aset milik pemerintahan daerah;
- j. Pemeliharaan saluran tersier;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan

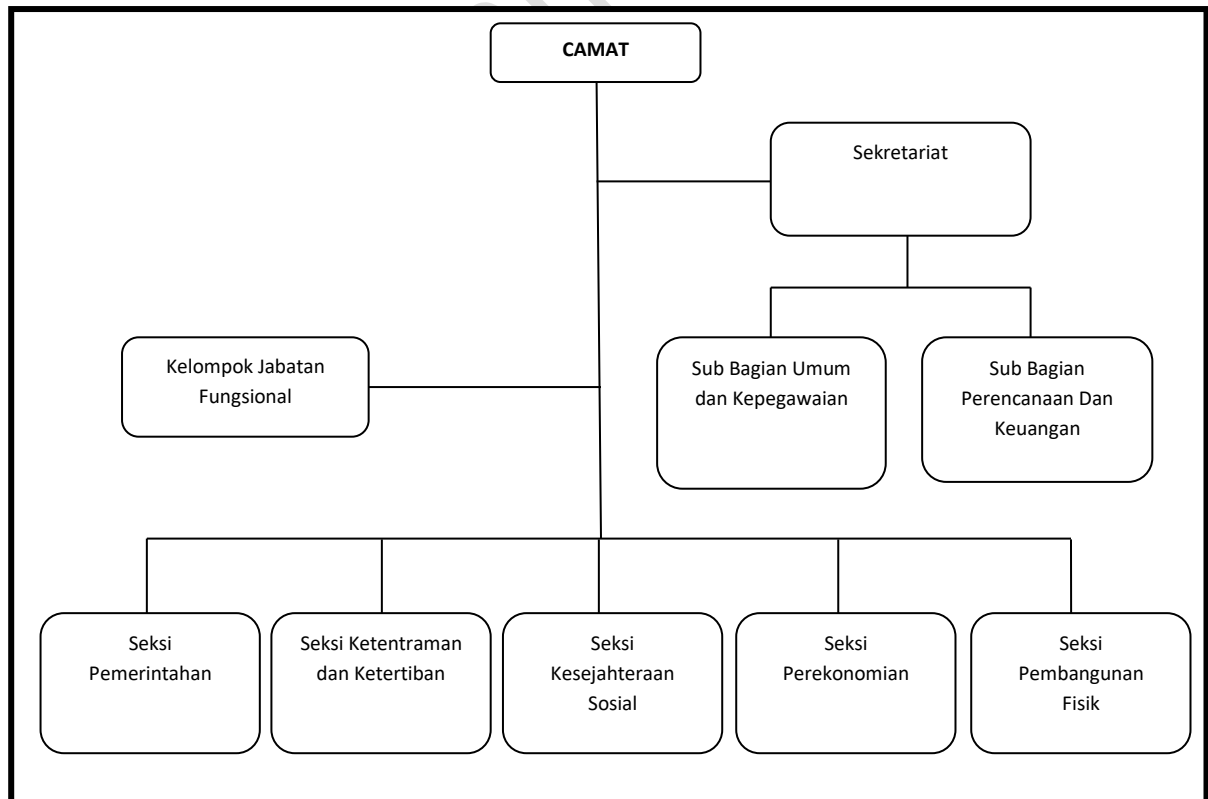
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata



Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Gedangan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Camat
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - Seksi Pembangunan Fisik
 - Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Perekonomian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan





2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN GEDANGAN

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Perangkat Daerah adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi dan sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya serta aset dan potensi yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata fisik dan non fisik dalam merealisasikan tujuan organisasi. Susunan kepegawaian di Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Kondisi Kepegawaian Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

NO	URAIAN	GOLONGAN								HONORER			JUMLAH
		IV		III		II		I		L	P	Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	CAMAT		1										1
2	SEKRETARIAT	1		1	4	1				4	4	8	15
3	SEKSI PEMERINTAHAN			1		1				1		1	3
4	SEKSI PEMBANGUNAN FISIK					2				4		4	6
5	SEKSI KESSOS			1	1						1	1	3
6	SEKSI TRANTIB			1		5				5		5	11
7	SEKSI PEREKONOMIAN			1	1							0	2
	JUMLAH	1	1	5	6	9	0	0	0	14	5	19	41

Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Gedangan sebanyak 41 orang dengan rincian:

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
----	--------	---	---	--------



1	PEJABAT STRUKTURAL	5	3	8
2	STAF /ASN	10	3	13
3	TENAGA TEKNIS / FUNGSIONAL		1	1
4	PENGAMANAN KANTOR / NON ASN	3		3
5	KEBERSIHAN DLHK / NON ASN	4		4
6	HONORER / NON ASN	7	5	12
	JUMLAH	29	12	41

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jabatan didukung oleh 41 orang dengan rincian 8 orang sebagai pejabat struktural, 13 orang sebagai staf, 1 orang sebagai tenaga teknis/fungsional, 3 orang sebagai pengaman kantor, 4 orang sebagai petugas kebersihan DLHK / Non ASN dan 12 orang sebagai tenaga honorer/Non ASN orang sebagai tenaga honorer.

2. Pegawai Berdasarkan Golongan:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1	1	2
2	GOLONGAN III	5	6	11
3	GOLONGAN II	9		9
4	GOLONGAN I			0
5	HONORER	14	5	19
	JUMLAH	29	12	41



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan golongan didukung oleh 41 orang dengan rincian 2 orang termasuk Golongan IV, 11 orang termasuk Golongan III, 9 orang termasuk Golongan II dan 19 orang termasuk honoror. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua golongan yang mendominasi dalam Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yaitu Golongan III dan golongan II masing-masing sejumlah 9 orang dan 11 orang.

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	L	P	JUMLAH
1	PASCA SARJANA	3	1	4
2	SARJANA	3	6	9
3	DIPLOMA	2	2	4
4	SLTA	21	2	23
5	SLTP	1		1
6	SD			
	JUMLAH	30	11	41

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pendidikan didukung oleh 41 orang dengan rincian 4 orang lulusan Pasca Sarjana, 9 orang lulusan Sarjana, 4 orang lulusan Diploma, 23 orang lulusan SLTA dan 1 orang lulusan SMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo di dominasi oleh lulusan SLTA sejumlah 23 orang.



2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Gedangan dilakukan oleh petugas atau aparatur kecamatan sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai pemohon. Dalam mengukur kinerja, pada tahun 2020 Kecamatan memiliki 10 sasaran, yaitu:

1. Prosentase Penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai Standar Pelayanan
2. Prosentase Penerbitan KK (Kartu Keluarga) yang sesuai Standar Pelayanan
3. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan
4. Prosentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan
5. Prosentase Penerbitan IMB rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m² yang sesuai Standar Pelayanan
6. Prosentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan
7. Prosentase jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti
8. Prosentase desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu
9. Prosentase desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu
10. Prosentase desa yang melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu.

Berdasarkan sasaran kinerja di atas, Kecamatan Gedangan mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Gedangan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020. Berikut adalah tabel tentang hasil analisis pencapaian kinerja layanan Kecamatan Gedangan dan tabel hasil analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan edangan tahun 2016-2020:



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Tabel 2.5 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	82	86	88	89	90	80	84	88	90	90	97	98	100	101	100
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	80	85	86	89	90	80	84	88	90	90	100	98	102	101	100
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum di bawah 20 m ² yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	102	101	100



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

6	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	80	84	86	89	90	80	84	88	90	90	100	100	101	101	102
7	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	1296	1296	1330	1330	1330	1296	1296	1330	1340	1340	100	100	101	101	101
8	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	93	100	100	100	100
10	Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Berdasarkan review pencapaian kinerja selama 5 (lima) tahun 2016 hingga 2021 dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah memenuhi target dimana realisasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Pada rasio kinerja dapat kita ketahui bahwa kinerja Kecamatan Gedangan sudah baik dan stabil setiap tahunnya. Bila dilihat setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penerbitan KTP Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Persentase Penerbitan KK Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Waris Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4. Persentase Penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase



penerbitan surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

5. Persentase Penerbitan Imb (Izin Mendirikan Bangunan) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perum Dibawah 200 M² Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m² yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m² yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengendalian pelayanan yang efektif.

6. Persentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Penerbitan legalitas dokumen ini menjadi sangat krusial dikarenakan saat pandemic / kondisi ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan bantuan social dengan syarat kelengkapan dokumen. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

7. Presentase Koordinasi Dan Fasilitasi Di Bidang Pembangunan Dan Pemerintahan Yang Ditidaklanjuti

Pada Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti sudah memenuhi target yang telah



ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

8. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun Apbdes Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

9. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun LPPD Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun LPPD tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

10. Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Musrenbang Desa Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

11. Persentase Penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha) sesuai dengan Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan SIUP/TDP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan yang dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam mensupport performance UKM dalam menghadapi pandemic Covid-19. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga



mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 kinerja pelayanan yang sedikit menurun dikarenakan perubahan kebijakan mengacu pada pengendalian protocol kesehatan (Prokes) dan meminimalkan tatap muka dalam pelayanan.

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

1. Penerbitan KTP , KK , Surat Pindah, Surat Keterangan Waris, Surat Perubahan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pencari Kerja, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 200 M2 dan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang belum sesuai Standar Pelayanan;
2. Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
3. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal,
5. Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan mutasi;
6. Kurangnya koordinasi internal;
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa aktifitas pelayanan menjadi terhambat;
9. Pelayanan yang dilakukan secara online sering mengalami kendala;
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan IT dalam penyelesaian permasalahan pelayanan secara online;



11. Kurangnya informasi dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan pelayanan secara online;
12. Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Meningkatkan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Pelayanan;
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan dalam bidang Kependudukan kepada Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa;
3. Meningkatkan komitmen Aparatur Sipil Negara dalam mematuhi Standar Pelayanan;
4. Mengoptimalkan kepatuhan Standar Pelayanan;
5. Menambah tenaga Aparatur Sipil Negara yang menangani Pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi internal;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan secara on line di masa pandemi Covid-19;
9. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian kendala jaringan online.
10. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga IT di ruang pelayanan;
11. Meningkatkan Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Gedangan dan meningkatkan sosialisasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
12. Meningkatkan koordinasi dengan penuh tanggungjawab untuk mendorong terbentuknya desa-desa maju di wilayah Kecamatan Gedangan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata



Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026.

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini serta memperhatikan hasil pencapaian pelayanan, analisa RTRW Kecamatan Gedangan dan KLHS Kecamatan Gedangan, maka tantangan dan peluang Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Matrik Tantangan dan Peluang

Tantangan	<ol style="list-style-type: none">1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup3. Belum terib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat desa4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD, dan MusrenbangDes5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang6. Pelaksanaan protokol kesehatan belum optimal untuk mengurangi penyebaran Covid 19
Peluang	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya2. Adanya perwujudan e-government3. Diwujudkan pelayanannya yang mudah dalam aplikasi Online4. Peningkatan Kompetensi SDM Kecamatan seiring dengan tuntutan media informasi pelayanan5. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen terkait Standar Pelayanan secara Dokumentasi Online / Offline

Proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana



strategis (Renstra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Renja Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Renja Perangkat Daerah terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lain.

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gedangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gedangan. Selanjutnya belanja Kecamatan Gedangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpol.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Keberadaan Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo maka tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Gedangan berfokus pada urusan pemerintahan yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja. Setelah Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021 - 2026.

Identifikasi permasalahan di Kantor Kecamatan Gedangan dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang terfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Gedangan serta dikolaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Kecamatan Gedangan. Permasalahan pelayanan adalah perbedaan / kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja Kecamatan Gedangan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo seperti halnya instansi lainnya



juga memiliki permasalahan-permasalahan yang diharapkan ataupun tidak tetap harus dihadapi. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	Persentase penerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan	100	1. Kualitas dan Kuantitas Sumber daya aparatur 3. Sarana dan prasarana 4. SOP pelayanan 5. Perencanaandan pelaporan kinerja kecamatan 6. Sinergitas antarbidang 7. Administrasi perkantoran	1. Pemahaman masyarakat tentang syarat pelayanan umum 2. Administratif tingkat desa 3. Kedisiplinan penyusunan dokumen desa 4. Kualitas sumberdaya aparatur desa	1. Kurangnya jumlah SDM ruang pelayanan yang memiliki jiwa pelayanan prima 2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan 3. Ketersediaan sarana dan prasarana belumoptimal 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait persyaratan dalam pelayanan umum 5. Perencanaan danpelaporankinerja kecamatan masih belumoptimal 6. Belum sinerginya hubunganantar pengelola keuangan daerah 7. Belum tertib danlemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan 8. Belum tertib dan lemahnyaadministrasi perkantoran tingkat Desa 9. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD, dan MusrenbangDes 10. Pemahaman aparaturnya desaterkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
2	Persentase penerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan	100			
3	Persentase penerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan	100			
4	Persentase penerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan	100			
5	Persentase penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m ² yang sesuai Standar Pelayanan	100			
6	Persentase penerbitan SIUP/TDP pada Wilayah Kecamatan Gedangan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
7	Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan	100			
8	Jumlah koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditidaklanjuti	12330			
9	Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu	100			



3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan tahun 2016-2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021-2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021-2026, yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”***.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi di *breakdown* ke dalam tiap misi.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan diantaranya adalah Kecamatan Gedangan. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memberikan pedoman bagi Kecamatan Gedangan dalam menyusun Renstra Kecamatan Gedangan. Berdasarkan visi misi dan isu strategis yang ada maka ditetapkan Tujuan dari masing-masing misi yang diukur dengan indikator. Kelima misi tersebut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;



2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;
4. Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Dari 5 (lima) misi RPJMD, ada 2 misi yang harus di jadikan acuan oleh kecamatan Gedangan yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-2. Ini menjadi pendorong untuk Kecamatan Gedangan untuk pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Visi : <i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan</i>			
Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha 2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang belum sesuai Standar Pelayanan; - Kurangnya pemahaman mengenai Standar Pelayanan; - Kurangnya komitmen dalam mematuhi Standar Pelayanan; - Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal; - Adanya kekurangan Sumber Daya Manusia; - Kurangnya sarana dan prasarana; - Adanya pandemi Covid-19 membuat aktifitas pelayanan terhambat; - Pelayanan secara online sering mengalami kendala; - Kurangnya kemampuan IT pelayanan secara online; - Kurangnya informasi masyarakat dalam pelayanan online. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada; 2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan; 2. Tersedianya dukungan APBD.
	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori desa maju; 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurang profesionalnya beberapa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pelatihan secara



	- Kurangnya koordinasi internal;	personel organisasi.	teknis dari Dinas terkait. 2. Adanya dukungan kekeluargaan antar karyawan yang sangat baik.
--	----------------------------------	----------------------	--

Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam faktor penghambat dan faktor pendorong. Fokus pada misi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di kabupaten Sidoarjo. Penjabaran faktor penghambat dan faktor pendorong pada Misi tersebut secara substansial memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di level pemerintah daerah maupun Kecamatan Gedangan.

Kecamatan Gedangan memiliki beberapa penghambat / permasalahan untuk bisa mencapai Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Disamping itu, Kecamatan Gedangan juga memiliki faktor pendorong untuk mengatasi penghambat / permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya faktor pendorong yang mampu mengatasi faktor penghambat maka diharapkan Kecamatan Gedangan mampu untuk mewujudkan misi tersebut.

3.3 TELAAH RENSTRA KABUPATEN SIDOARJO

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni “*Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani*” . Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa



depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih terinci untuk memudahkan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan



tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra Organisasi Pemerintah Daerah dan menjabarkan Organisasi Pemerintah Daerah di tahun yang bersesuaian.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Startegi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arah ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).



d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam mewujudkan target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.4 TELAAH TATA RUANG WILAYAH

Penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 disesuaikan dengan indikasi program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikasi program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang tercakup dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Dalam RTRW



Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistim perkotaan Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kasawan Agropolitas di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Gedangan yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yaitu menunjukkan bahwa Kecamatan Gedangan merupakan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dalam hierarki atau besaran perkotaan termasuk perkotaan sedang. Secara perwilayahan Kecamatan Gedangan termasuk ke dalam SSWP 1 yaitu dengan pusat di Kawasan Waru dan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan, dikembangkan fasilitas transportasi, mall, bandar udara dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal, regional, dan internasional. Kecamatan Gedangan masuk pada rencana pengembangan wilayah prioritas yang menadapatkan pelayanan air bersih dan sekaligus sebagai jaringan distribusi air bersih serta sebagai ruang untuk utilitas (air bersih). Kondisi saat ini Kecamatan Gedangan memiliki zona industri seluas 534,36 Ha dan kawasan permukiman seluas 12,77 Ha serta kawasan permukiman perkotaan seluas 1,511,72 Ha. Kecamatan Gedangan termasuk juga kawasan Militer yang terdiri dari Kawasan Tangsi Militer, Kawasan Latihan Militer, dan Kawasan Penyimpanan Mesiu/Amunisi

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian



terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Dibahas melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan seluruh jajaran Kecamatan Gedangan, Akademisi, dan stake holder terkait.
- b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel.
 - 2) Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut.

Tabel 3.3
Kriteria Pembobotan

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta

Berdasarkan pada penelaahan identifikasi masalah, visi misi kepala daerah dan RTRW, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Kecamatan Gedangan antara lain:

- a. Kekuatan



1. Adanya pendanaan yang konsisten dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
 2. Keberadaan kecamatan semakin kuat seiring dengan diterbitkannya regulasi baru Perbup Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 mengenai tupoksi kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
 3. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati ke Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
- b. Kelemahan
1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal
 2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan
 3. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam administrasi barang
 4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal
 5. Perencanaan & Pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal
 6. Belum sinerginya hubungan antar pengelola keuangan daerah
 7. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan
 8. Kualitas Performen Nilai SKM Kecamatan
 9. Berapa Desa menuju Mandiri
 10. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan , Penyusunan APBDes
- c. Peluang
1. Adanya otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya
 2. Adanya pewujudan *e-government*
- d. Ancaman
1. Tuntutan terselenggaranya koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan
 2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan hidup
 3. Belum tertib dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa
 4. Belum disiplinnya pelaksanaan penyusunan APBDes, LPPD dan MusrenbangDes



5. Pemahaman aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan dokumen dan proses pembangunan desa yang masih kurang
6. Belum berakhirnya masa pandemi dan kurang disiplin penerapan protokol kesehatan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inofatif. Adapun Visi yang mengacu pada Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”.

Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kabupaten Sidoarjo dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;

MISI 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;

MISI 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;

MISI 4: Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;

MISI 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga



Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan, penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan Publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung terselenggaranya Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu “*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha*”, Kecamatan Gedangan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan*”.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	70,9	80	80,1	80,2	80,3	80,4
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Gedangan Dilaksanakan Dengan Baik	84	84	84	84	84	84
		Persentase Desa Maju	40	40	40	40	40	40



		di Kecamatan Gedangan						
		Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	BB	B	A	A	A	A

Untuk mendukung terselenggaranya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD yaitu “ *Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital*“ dan “*Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha*” maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN GEDANGAN

Strategi Pembangunan Renstra Kecamatan Gedangan tahun 2021-2026 sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan.

Strategi pembangunan adalah cara / pendekatan / kebijakan / tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode Renstra. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun Strategi, yang menggambarkan mengenai cara / pendekatan / kebijakan / tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Visi dan Misi Kecamatan Gedangan.

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misinya serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan Strategi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;
- b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
- e. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan;
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;



- g. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai;
- h. Meningkatkan partisipatif masyarakat.

Strategi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan guna setiap misi Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Gedangan selama periode Tahun 2016 - 2021 yang tertuang pada Matrik Renstra 2016 - 2021 pada lampiran 2.

Kebijakan Kecamatan Gedangan untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif;
3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat;
4. Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	a. Mengupayakan kualitas personil agar pelayanan dapat berjalan secara optimal; b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan; c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDM di tingkat Desa dan Kecamatan; d. Memberikan ketrampilan kepada petugas pelayanan; e. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan; f. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai; g. Meningkatkan partisipatif masyarakat	1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 2. Mengelola tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif 3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/ kelurahan serta masyarakat	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	1. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan



				umum 3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan	Mengembangkan budaya Pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota

Penjelasan urutan dari Visi, Misi, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Program masing-masing bagian terkait di Kecamatan Gedangan dijelaskan dalam tata urutan dan korelasi pada Cascading Kinerja Kecamatan Gedangan yang terlampir pada Lampiran.1

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGAN

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan pada Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran serta memberikan sumbangan bagi pencapaian misi Kecamatan Gedangan. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Gedangan ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gedangan dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gedangan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan program terkait Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka langkah operasional dan pengendalian di Kecamatan Gedangan telah dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi Perangkat Daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi bagian dan seksi di Kecamatan Gedangan dalam tugas pokoknya, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun rencana program dan kegiatan didalam renstra dapat dilihat di dalam table Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. (Lampiran 1)



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	70,9	80	80,1	80,2	80,3	80,4	80,4
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Gedangan Dilaksanakan Dengan Baik	84	84	84	84	84	84	84
Persentase Desa Maju di Kecamatan Gedangan	40	40	40	40	40	40	40
Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	BB	B	A	A	A	A	A



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2026, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transisi penyusunan Renstra Kecamatan Gedangan periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Gedangan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Gedangan ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Gedangan harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

CAMAT GEDANGAN

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

PEMBINA

NIP. 19770924 199701 2001



LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
2. Cascading Kinerja Kecamatan Gedangan
3. Berita Acara Penyusunan Renstra
4. Surat Keputusan Camat Gedangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	11
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	100%	254.967.628	100%	280.464.391	100%	308.510.830	100%	339.361.913	100%	373.298.104	100%	410.627.915	Kecamatan Gedangan	Camat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	a. Prosentase administrasi kependudukan yang diproses b. Prosentase pelayanan umum yang telah diselesaikan	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	254.967.628	a. 100% b. 100%	280.464.391	a. 100% b. 100%	308.510.830	a. 100% b. 100%	339.361.913	a. 100% b. 100%	373.298.104	a. 100% b. 100%	410.627.915	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Prosentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP (IKK) b. Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK) c. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota (IKK) d. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (UI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan (IKK) e. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. A/N b. A/N c. A/N d. A/N e. A/N	a. A/N b. A/N c. A/N d. A/N e. A/N	254.967.628	a. A/N b. A/N c. A/N d. A/N e. A/N	280.464.391	a. A/N b. A/N c. A/N d. A/N e. A/N	308.510.830	a. A/N b. A/N c. A/N d. A/N e. A/N	339.361.913	a. A/N b. A/N c. A/N d. A/N e. A/N	373.298.104	a. A/N b. A/N c. A/N d. A/N e. A/N	410.627.915	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	15.795.158.007	90%	17.374.673.808	90%	19.112.141.188	90%	21.023.355.307	90%	23.125.690.838	90%	25.438.259.922	Kecamatan Gedangan	Sekretaris Kecamatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 4 kali b. NA	a. 4 kali b. NA	174.513.802	a. 4 kali b. NA	191.965.182	a. 4 kali b. NA	211.161.700	a. 4 kali b. NA	232.277.870	a. 4 kali b. NA	255.505.658	a. 4 kali b. NA	281.056.223	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	367.702	2 dokumen	404.472	2 dokumen	444.919	2 dokumen	489.411	2 dokumen	538.352	2 dokumen	592.188	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000	1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	338.800	1 Dokumen	372.680	1 Dokumen	409.948	1 Dokumen	450.943	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	525.000	2 dokumen	577.500	2 dokumen	635.250	2 dokumen	698.775	2 dokumen	768.653	2 dokumen	845.518	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	172.501.100	4 Dokumen	189.751.210	4 Dokumen	208.726.331	4 Dokumen	229.598.964	4 Dokumen	252.558.861	4 Dokumen	277.814.747	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD	90%	90%	3.908.233.577	90%	4.299.056.935	90%	4.728.962.628	90%	5.201.858.891	90%	5.722.044.780	90%	6.294.249.258	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	25 Orang	25 Orang	3.899.628.560	25 Orang	4.289.591.416	25 Orang	4.718.550.558	25 Orang	5.190.405.613	25 Orang	5.709.446.175	25 Orang	6.280.390.792	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	NA	NA	1.500.000	NA	1.650.000	NA	1.815.000	NA	1.996.500	NA	2.196.150	NA	2.415.765	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah SPM yang diterbitkan	NA	NA	1.230.017	NA	1.353.019	NA	1.488.321	NA	1.637.153	NA	1.800.868	NA	1.980.955	Kecamatan Gedangan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000	1 Laporan	3.025.000	1 Laporan	3.327.500	1 Laporan	3.660.250	1 Laporan	4.026.275	Kecamatan Gedangan	Kasabag Perencanaan dan Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	3.375.000	12 Laporan	3.712.500	12 Laporan	4.083.750	12 Laporan	4.492.125	12 Laporan	4.941.338	12 Laporan	5.435.471	Kecamatan Gedangan	Kasabag Perencanaan dan Keuangan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1. Persentase BMD SKPD yang telah registrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah sertifikasi	a. 90% b. 90%	a. 90% b. 90%	5.366.140	a. 90% b. 90%	5.902.754	a. 90% b. 90%	6.493.029	a. 90% b. 90%	7.142.332	a. 90% b. 90%	7.856.566	a. 90% b. 90%	8.642.222	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan	5.366.140	3 Laporan	5.902.754	3 Laporan	6.493.029	3 Laporan	7.142.332	3 Laporan	7.856.566	3 Laporan	8.642.222	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase alat dan bahan penunjang yang disediakan	90%	90%	1.022.201.097	90%	1.124.421.207	90%	1.236.863.327	90%	1.360.549.660	90%	1.496.604.626	90%	1.646.265.089	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	124 Unit	52 Buah	18.352.695	52 Buah	20.187.965	52 Buah	22.206.761	52 Buah	24.427.437	52 Buah	26.870.181	52 Buah	29.557.199	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 buah	645 Buah	381.826.258	645 Buah	420.008.884	645 Buah	462.009.772	645 Buah	508.210.749	645 Buah	559.031.824	645 Buah	614.935.007	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0 Jenis	0 Jenis	338.205	0 Jenis	372.026	0 Jenis	409.228	0 Jenis	450.151	0 Jenis	495.166	0 Jenis	544.683	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. 645 Liter 2. NA Liter	1. 645 Liter 2. NA Liter	173.800.000	1. 645 Liter 2. NA Liter	191.180.000	1. 645 Liter 2. NA Liter	210.298.000	1. 645 Liter 2. NA Liter	231.327.800	1. 645 Liter 2. NA Liter	254.460.580	1. 645 Liter 2. NA Liter	279.906.638	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	600 Buah	91.627.212	600 Buah	100.789.933	600 Buah	110.868.927	600 Buah	121.955.819	600 Buah	134.151.401	600 Buah	147.566.541	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	5.124.984	3 Jenis	5.637.482	3 Jenis	6.201.231	3 Jenis	6.821.354	3 Jenis	7.503.489	3 Jenis	8.253.838	Kecamatan Gedangan	Kasabag Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah bahan/material yang tersedia	4 Laporan	4 Laporan	8.905.743	4 Laporan	9.796.317	4 Laporan	10.775.949	4 Laporan	11.853.544	4 Laporan	13.038.898	4 Laporan	14.342.788	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Fasilitas Kunjungan Tamu		a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Presentase kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	92.226.000	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	101.448.600	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	111.593.460	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	122.752.806	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	135.028.087	a. 1624 Kotak b. 12 Bulan	148.530.895	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	402.627.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	65 Buah	65 Buah	8.283.955.791	65 Buah	9.112.351.370	65 Buah	10.023.586.507	65 Buah	11.025.945.158	65 Buah	12.128.539.674	65 Buah	13.341.393.641	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0 Unit	0 Unit	96.000.000	0 Unit	105.600.000	0 Unit	116.160.000	0 Unit	127.776.000	0 Unit	140.553.600	0 Unit	154.608.960	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	3 Unit	96.000.000	0 Unit	105.600.000	0 Unit	116.160.000	0 Unit	127.776.000	0 Unit	140.553.600	0 Unit	154.608.960	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah alat besar yang diadakan	0 Unit	0 Unit	50.000.000	0 Unit	55.000.000	0 Unit	60.500.000	0 Unit	66.550.000	0 Unit	73.205.000	0 Unit	80.525.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeleur yang diadakan	23 Buah	100 Buah	706.602.705	23 Buah	777.262.976	23 Buah	854.989.273	23 Buah	940.488.200	23 Buah	1.034.537.020	23 Buah	1.137.990.722	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	70 Buah	10 Buah	705.353.086	70 Buah	775.888.395	70 Buah	853.477.234	70 Buah	938.824.957	70 Buah	1.032.707.453	70 Buah	1.135.978.199	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Gedung atau bangunan lainnya yang diadakan	A/N	1 Gedung	6.630.000.000	A/N	7.293.000.000	A/N	8.022.300.000	A/N	8.824.530.000	A/N	9.706.983.000	A/N	10.677.681.300	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	90%	90%	1.349.977.600	90%	1.484.975.360	90%	1.633.472.896	90%	1.796.820.186	90%	1.976.502.204	90%	2.174.152.425	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1700 Surat	1700 Surat	1.500.000	1700 Surat	1.650.000	1700 Surat	1.815.000	1700 Surat	1.996.500	1700 Surat	2.196.150	1700 Surat	2.415.765	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	294.000.000	12 bulan	323.400.000	12 bulan	355.740.000	12 bulan	391.314.000	12 bulan	430.445.400	12 bulan	473.489.940	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	NA	NA	3.000.000	NA	3.300.000	NA	3.630.000	NA	3.993.000	NA	4.392.300	NA	4.831.530	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1.051.477.600	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1.156.625.360	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1.272.287.896	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1.399.516.686	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1.539.468.354	1. 4 orang / bulan 2. 3 orang / bulan 3. 14 orang / bulan 4. 14 orang / bulan	1.693.415.190	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	60 Unit	60 Unit	947.000.000	60 Unit	1.041.700.000	60 Unit	1.145.870.000	60 Unit	1.260.457.000	60 Unit	1.386.502.700	60 Unit	1.525.152.970	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	32.000.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	35.200.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	38.720.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	42.592.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	46.851.200	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	51.536.320	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	165.000.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	181.500.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	199.650.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	219.615.000	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	241.576.500	1. 16 unit 2. 0 buah 3. 16 unit	265.734.150	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		a. Jumlah Alat Besar yang dipelihara b. Jumlah Alat Besar yang diusur perijinannya	0 Unit	0 Unit	20.000.000	0 Unit	22.000.000	0 Unit	24.200.000	0 Unit	26.620.000	0 Unit	29.282.000	0 Unit	32.210.200	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		a. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara b. Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diusur perijinannya	0 Unit	0 Unit	15.000.000	0 Unit	16.500.000	0 Unit	18.150.000	0 Unit	19.965.000	0 Unit	21.961.500	0 Unit	24.157.650	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebeleur yang dipelihara	50 buah	50 buah	50.000.000	50 buah	55.000.000	50 buah	60.500.000	50 buah	66.550.000	50 buah	73.205.000	50 buah	80.525.500	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 buah	13 buah	425.000.000	13 buah	467.500.000	13 buah	514.250.000	13 buah	565.675.000	13 buah	622.242.500	13 buah	684.466.750	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	120 M2	120 M2	240.000.000	120 M2	264.000.000	120 M2	290.400.000	120 M2	319.440.000	120 M2	351.384.000	120 M2	386.522.400	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	a. 100% b. NA	a. 100% b. NA	103.910.000	a. 100% b. NA	114.301.000	a. 100% b. NA	125.731.100	a. 100% b. NA	138.304.210	a. 100% b. NA	152.134.631	a. 100% b. NA	167.348.094	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	26 Stel	26 Stel	8.910.000	26 Stel	9.801.000	26 Stel	10.781.100	26 Stel	11.859.210	26 Stel	13.045.131	26 Stel	14.349.644	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0 Orang	95.000.000	0 Orang	104.500.000	0 Orang	114.950.000	0 Orang	126.445.000	0 Orang	139.089.500	0 Orang	152.998.450	Kecamatan Gedangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	100%	3.358.640.167	100%	3.694.504.184	100%	4.063.954.602	100%	4.470.350.062	100%	4.917.385.069	100%	2.090.499.622	Kecamatan Gedangan	Camat
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.328.337.979	100%	2.561.171.777	100%	2.817.288.955	100%	3.099.017.850	100%	3.408.919.635	100%	431.187.645	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan Fisik
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	4 Laporan	12 Laporan	267.733.603	12 Laporan	294.506.963	12 Laporan	323.957.660	12 Laporan	356.353.426	12 Laporan	391.988.768	12 Laporan	431.187.645	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan Fisik
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat	90%	100%	1.030.302.188	100%	1.133.332.407	100%	1.246.665.647	100%	1.371.332.212	100%	1.508.465.433	100%	1.659.311.977	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Perekonomian c. Kasi Kesos d. Kasi Pembangunan Fisik
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai lusan maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis b. Jumlah Izin Reklame	a. 75 Orang b. A/N	a. 75 Orang b. A/N	18.626.200	a. 75 Orang b. A/N	20.488.820	a. 75 Orang b. A/N	22.537.702	a. 75 Orang b. A/N	24.791.472	a. 75 Orang b. A/N	27.270.619	a. 75 Orang b. A/N	29.997.681	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

			insidental yang diterbitkan															
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	a. Jumlah Sosialisasi Pencegahan stunting yang dilaksanakan b. Jumlah SKTM yang diterbitkan	a. 4 Kali b. 15 surat	a. 4 Kali b. 15 surat	20.689.540	a. 4 Kali b. 15 surat	22.758.494	a. 4 Kali b. 15 surat	25.034.343	a. 4 Kali b. 15 surat	27.537.778	a. 4 Kali b. 15 surat	30.291.556	a. 4 Kali b. 15 surat	33.320.711	Kecamatan Gedangan	Kasi Kesos
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah movev bidang perekonomian yang dilaksanakan b. Jumlah pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan c. Jumlah izin usaha mikro kecil (IUMK) yang diterbitkan d. Jumlah TDP usaha mikro yang diterbitkan	a. 15 Desa b. 4Kali c. 50 ijin d. A/N	a. 15 Desa b. 4Kali c. 50 ijin d. A/N	990.986.448	a. 15 Desa b. 4Kali c. 50 ijin d. A/N	1.090.085.093	a. 15 Desa b. 4Kali c. 50 ijin d. A/N	1.199.093.602	a. 15 Desa b. 4Kali c. 50 ijin d. A/N	1.319.002.962	a. 15 Desa b. 4Kali c. 50 ijin d. A/N	1.450.903.259	a. 15 Desa b. 4Kali c. 50 ijin d. A/N	1.595.993.584	Kecamatan Gedangan	Kasi perekonomian
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti b. persentase temuan pelanggaran perda, perkara dan konflik yang ditangani	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	161.134.569	a. 100% b. 100%	177.248.026	a. 100% b. 100%	194.972.828	a. 100% b. 100%	214.470.111	a. 100% b. 100%	235.917.122	a. 100% b. 100%	259.508.835	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Tranitb b. Kasi Kesos
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Prosentase Kegiatan yustisi yang dilaksanakan b. Prosentase movev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan c. Prosentase kegiatan sosial dan keagamaan yang dilaksanakan	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 100% b. 100% c. 100%	143.821.913	a. 100% b. 100% c. 100%	158.204.104	a. 100% b. 100% c. 100%	174.024.515	a. 100% b. 100% c. 100%	191.426.966	a. 100% b. 100% c. 100%	210.569.663	a. 100% b. 100% c. 100%	231.626.629	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Tranitb b. Kasi Kesos
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan yustisi yang dilaksanakan	A/N	A/N	48.766.269	A/N	53.642.896	A/N	59.007.185	A/N	64.907.904	A/N	71.398.694	A/N	78.538.564	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Tranitb b. Kasi Kesos
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	a. Jumlah movev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan sosial dan keagamaan yang dilaksanakan	a. A/N b. A/N	a. A/N b. A/N	95.055.644	a. A/N b. A/N	104.561.208	a. A/N b. A/N	115.017.329	a. A/N b. A/N	126.519.062	a. A/N b. A/N	139.170.968	a. A/N b. A/N	153.088.065	Kecamatan Gedangan	a. Kasi Tranitb b. Kasi Kesos
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase temuan pelanggaran perda, perkara dan konflik yang ditangani	100%	100%	17.312.656	100%	19.043.922	100%	20.948.314	100%	23.043.145	100%	25.347.460	100%	27.882.206	Kecamatan Gedangan	Kasi Tranitb



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		a. Jumlah kegiatan penerbitan terhadap pelanggaran perda b. Jumlah temuan konflik sosial yang ditindaklanjuti	a. A/N b. A/N	a. A/N b. A/N	17.312.656	a. A/N b. A/N	19.043.922	a. A/N b. A/N	20.948.314	a. A/N b. A/N	23.043.145	a. A/N b. A/N	25.347.460	a. A/N b. A/N	27.882.206	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	A/N	100%	122.568.203	100%	134.825.023	100%	148.307.526	100%	163.138.278	100%	179.452.106	100%	197.397.317	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	122.568.203	1 Kegiatan	134.825.023	1 Kegiatan	148.307.526	1 Kegiatan	163.138.278	1 Kegiatan	179.452.106	1 Kegiatan	197.397.317	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegiatan	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegiatan	122.568.203	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegiatan	134.825.023	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegiatan	148.307.526	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegiatan	163.138.278	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegiatan	179.452.106	a. 1 Kegiatan b. 2 Kegiatan	197.397.317	Kecamatan Gedangan	Kasi Trantib
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	76.979.000	100%	84.676.900	100%	93.144.590	100%	102.459.049	100%	112.704.954	100%	123.975.449	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	15 Desa	15 Desa	76.979.000	15 Desa	84.676.900	15 Desa	93.144.590	15 Desa	102.459.049	15 Desa	112.704.954	15 Desa	123.975.449	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah kegiatan pendampingan dan monev atas kegiatan pemerintahan desa yang dilaksanakan	15 Desa	15 Desa	8.660.000	15 Desa	9.526.000	15 Desa	10.478.600	15 Desa	11.526.460	15 Desa	12.679.106	15 Desa	13.947.017	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		a. Jumlah pendampingan Penyusunan APBDes b. Jumlah pendampingan penyusunan inventaris aset desa	a. 15 Laporan b. 15 Laporan	a. 15 Laporan b. 15 Laporan	25.000.000	a. 15 Laporan b. 15 Laporan	27.500.000	a. 15 Laporan b. 15 Laporan	30.250.000	a. 15 Laporan b. 15 Laporan	33.275.000	a. 15 Laporan b. 15 Laporan	36.602.500	a. 15 Laporan b. 15 Laporan	40.262.750	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah koordinasi dengan Kepala desa terkait pelaksanaan tugas kepala desa	15 Desa	15 Desa	16.819.000	15 Desa	18.500.900	15 Desa	20.350.990	15 Desa	22.386.089	15 Desa	24.624.698	15 Desa	27.087.168	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

		Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah pendampingan / sosialisasi pelaksanaan PILKADES	15 Desa	15 Desa	26.500.000	15 Desa	29.150.000	15 Desa	32.065.000	15 Desa	35.271.500	15 Desa	38.798.650	15 Desa	42.678.515	Kecamatan Gedangan	Kasi Pemerintahan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100%	100%	56.300.000	100%	61.930.000	100%	68.123.000	100%	74.935.300	100%	82.428.830	100%	90.671.713	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembagunan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi dengan pemerintah desa terkait forum musrenbang dan monev kegiatan	15 Desa	15 Desa	56.300.000	15 Desa	61.930.000	15 Desa	68.123.000	15 Desa	74.935.300	15 Desa	82.428.830	15 Desa	90.671.713	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembagunan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		jumlah koordinasi forum musrenbang desa yang dilaksanakan	15 Desa	15 Desa	28.500.000	15 Desa	31.350.000	15 Desa	34.485.000	15 Desa	37.933.500	15 Desa	41.726.850	15 Desa	45.899.535	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembagunan
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		a. Jumlah pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan b. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya	a. 15 Desa b. 15 Laporan	a. 15 Desa b. 15 Laporan	27.800.000	a. 15 Desa b. 15 Laporan	30.580.000	a. 15 Desa b. 15 Laporan	33.638.000	a. 15 Desa b. 15 Laporan	37.001.800	a. 15 Desa b. 15 Laporan	40.701.980	a. 15 Desa b. 15 Laporan	44.772.178	Kecamatan Gedangan	Kasi Pembagunan

LAMPIRAN 2

CASCADING KINERJA KECAMATAN GEDANGAN

VISI :

Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan



MISI TERKAIT RPJMD :

MISI 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha

MISI 2: Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan



TUJUAN :

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan



SASARAN 1:

Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

SASARAN 2:

Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

SASARAN 3:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

R P J M D	Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
KEPALA DAERAH	



R E N S T R A	CAMAT	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan 2. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator : Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Nilai IKM
---------------------------------	-------	---



R E N S T R A	SEKRETARIS	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Nilai Survey SKM
---------------------------------	------------	---



SEKRETARIS	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sasaran Kegiatan: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sasaran Kegiatan: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sasaran Kegiatan: Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan Indikator: Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi
------------	--	--	--	--	--	--	---



STAF	Laporan Kinerja, Dokumen Monev	Laporan Keuangan Gaji ASN	Laporan BMD SKPD	Laporan Pemeliharaan Sarana & Prasarana	Jumlah Inventarisir Kantor (Mebeuler, Kendaraan & Gedung)	Jumlah pegawai & Kebutuhan Rekening Listrik	Jumlah pemeliharaan sarana & prasarana
------	--------------------------------	---------------------------	------------------	---	---	---	--

R P J M D	Tujuan : <i>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan</i> Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
KEPALA DAERAH	



CAMAT	Sasaran : 1. <i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan</i> 2. <i>Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa</i> 3. <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i> Indikator : Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Nilai IKM
-------	--



R E N S T R A PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN)	Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sasaran Program: a. <i>Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP</i> b. <i>Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian</i> c. <i>Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid</i> d. <i>Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan</i> Indikator: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik
--	---



R E N S T R A	Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sasaran Kegiatan: Tingkat Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sasaran Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik	Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sasaran Kegiatan: Peningkatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Non Perizinan dan yang dilimpahkan Indikator: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik
---------------------------------	---	---	---



STAF	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi	Jumlah pelayanan umum yang telah diselesaikan Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	Jumlah permohonan, jumlah Monev, jumlah ijin dan jumlah pembinaan usaha
------	-------------------------------------	--	---

R P J M D	Tujuan : <i>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan</i> Indikator: Indeks Refomasi Birokrasi (IRB)
KEPALA DAERAH	



R E N S T R A	CAMAT	Sasaran : 1. <i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan</i> 2. <i>Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa</i> 3. <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i> Indikator : Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Nilai IKM
---------------------------------	-------	--



R E N S T R A	PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN	Program: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sasaran Program: a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti b. Persentase temuan pelanggaran perda, perkara dan konflik yang ditangani c. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti Indikator: Prosentasae penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasika ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik
---------------------------------	--	---



R E N S T R A	PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sasaran Kegiatan: Tingkat Sinergi dengan pihak terkait di wilayah Kecamatan Gedangan Indikator: Prosentasae penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik	Kegiatan: Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sasaran Kegiatan: Peningkatan harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator: Prosentasae penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik
---------------------------------	--	---	--



R E N S T R A	STAF	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaulanjuti	Jumlah Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan
---------------------------------	------	---	---

R P J M D	Tujuan : <i>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik kecamatan</i>
KEPALA DAERAH	



CAMAT	Sasaran : 1. <i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan</i> 2. <i>Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa</i> 3. <i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</i> Indikator : Nilai SAKIP, Nilai LPPD, Nilai IKM
-------	--



R E N S T R A PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN, PEREKONOMIAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN	Program: 1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sasaran Program: a. Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik b. Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu Indikator: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik
---	---



R E N S T R A	Kegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sasaran Kegiatan: Peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Indikator: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sasaran Kegiatan: Peningkatan kinerja administrasi Pemerintahan Desa Indikator: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik	Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Sasaran Kegiatan: Peningkatan kinerja perangkat Desa Indikator: Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Gedangan dilaksanakan dengan baik
---------------------------------	---	---	--



STAF	Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi	Jumlah pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan
------	---	--	--